

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2009, Program E-KTP dimulai dengan 4 kota percontohan yaitu Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. (Depdagri, 2009, p. 471. 13/ 3350/MD)

Selanjutnya program E-KTP diluncurkan pertama kali pada bulan Februari 2011, yang berjalan dalam 2 tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pertama berlangsung sampai 30 april 2012 di 2348 kecamatan dalam 197 Kabupaten/kota dengan 67 juta penduduk. Sedangkan pelaksanaan kedua berlangsung pada akhir 2012 di 3886 kecamatan dalam 300 Kabupaten/kota yang berbeda dengan 105 juta penduduk. (Soemaryani, 2013)

E-KTP memiliki aturan yang menyatakan bahwa percetakan E-KTP sudah harus selesai 1 jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setelah perekaman sesuai dengan kebijakan dari kemendagri dan informasi dari kecamatan yang diberikan kepada para masyarakat setempat. (Permendagri, 2018, p. 19)

Dalam pelaksanaan percetakan E-KTP, Pemerintah harus memiliki ketersediaan alat yang cukup agar mampu melaksanakan penyelenggaraan E-KTP sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Alat-alat tersebut berupa alat perekaman dan percetakan E-KTP yaitu blangko, *ribbon* (pita dan tinta), PVC (bahan kartu), cip, *print*, alat pendeteksi sidik jari, alat pendeteksi retina mata, kamera, dll yang terletak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Dalam pelaksanaanya polemik masalah keterlambatan proses percetakan E-KTP merupakan masalah besar yang hampir dialami oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil bertanggung jawab terhadap pengendalian alat

percetakan yang dilaksanakan di kantor Pemerintah Kabupaten Bandung dan alat perekaman di kantor-kantor kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

Keterlambatan percetakan E-KTP pada Kabupaten Bandung disebabkan ketersediaan alat pendukung percetakan E-KTP dari Kabupaten Bandung terbatas. Keterbatasan alat disebabkan karena alat yang diberikan oleh Pemerintah pusat masih berdasarkan anggaran dari Pemerintah pusat sendiri bukan berdasarkan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung tidak sanggup memenuhi kebutuhan percetakan E-KTP untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Walaupun jumlah masyarakat di Kabupaten Bandung dapat terukur, namun karena permintaan E-KTP masih bersifat fluktuatif. Permintaan E-KTP tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang baru berumur 17 tahun, tapi juga dari masyarakat yang kehilangan E-KTP yang dimiliki dan juga masyarakat pendatang yang ingin memiliki E-KTP di tempat tersebut baik dari warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

Selain keterbatasan alat, keterlambatan percetakan E-KTP juga diakibatkan karena permasalahan pada alat-alat perekaman yang ada di kecamatan. Permasalahan bisa berupa kerusakan dan kehilangan alat-alat pendukung perekaman E-KTP. Pemerintah Kabupaten masih tidak memiliki ketersediaan alat yang cukup sebagai pengganti barang yang rusak ataupun hilang sehingga proses percetakan E-KTP harus terhambat.

Sebagai solusi alternative pada saat alat yang berada di Kabupaten terbatas, maka antar kecamatan dapat melakukan transfer alat-alat perekaman E-KTP dari satu kecamatan yang masih memiliki alat berlebih kepada kecamatan lain yang mengalami kekurangan alat perekaman E-KTP. Namun pengawasan transfer alat antar kecamatan ini masih perlu dilakukan intensif. Karena saat ini pencatatan inventaris terhadap pengawasan transfer di lapangan masih mengalami kendala karena belum adanya sistem yang terintegrasi.

Kerusakan alat yang terjadi di Pemerintah bukan hanya karena kurang perawatan namun juga karena alat tersebut masa waktu penggunaannya sudah habis. Pencatatan masa waktu penggunaan barang ini tidak berada pada dinas yang menggunakan alat seperti disdukcapil atau kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung. Sehingga pegawai yang menggunakan alat sering tidak mengetahui masa waktu penggunaan barang tersebut.

Tidak adanya pengawasan secara keseluruhan terhadap alat dari Kabupaten Bandung menyebabkan proses penyelenggaraan E-KTP terhambat. Tidak hanya terhambat pada proses pencetakan data E-KTP yang sudah direkam dari masyarakat, namun juga terhambat pada kepercayaan masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP. Sehingga keseluruhan proses penyelenggaraan E-KTP merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam mengatasi masalah E-KTP terkait ketersediaan alat tersebut maka penelitian secara *Iterative Incremental* sangat dibutuhkan, karena metode ini memberikan solusi secara berulang sesuai dengan kondisi ketersediaan alat E-KTP yang terus berganti dan perbaikan secara berkala sedikit demi sedikit agar meminimalisir terjadinya kesalahan pada informasi.

Aplikasi yang akan digunakan adalah *open Enterprise resource planning/ODOO* Versi 12.0 karena bersifat *Open source* dan Fleksibel yang berarti ODOO dapat menghaikan aplikasi yang *User friendly* karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan tempat dilakukannya penelitian.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada bagian sebelumnya maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana solusi proses bisnis agar ketersediaan, kerusakan dan kehilangan alat dapat teratasi di Pemerintah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana solusi agar antar proses perpindahan inventaris E-KTP saling terkoneksi di Pemerintah Kabupaten Bandung dan mudah diawasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengoptimalkan pengecekan dan pemberian informasi yang akurat tentang ketersediaan alat E-KTP pada Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Mengoptimalkan pengawasan perubahan antar proses perpindahan inventaris E-KTP di Pemerintah Kabupaten Bandung

I.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian hanya berfokus pada aplikasi ERP/ Odoo versi 12.0 modul *inventory*
2. Pelampiran data berada di bawah Pemerintah setingkat Kabupaten Bandung sehingga dapat diakses oleh kecamatan dan dinas kependudukan dan catatan sipil
3. Penelitian ini mengikuti alur *Sistem Development Life Cycle* dengan berpatokan pada metodologi *Iterative Incremental* untuk meneliti terkait E-KTP Pemerintah Kabupaten Bandung.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam sistem pencatatan, pelaporan dan pengawasan seluruh inventarisasi barang sehingga kinerja dapat meningkat
2. Konektivitas pencatatan seluruh alur *inventory* sehingga unit kerja layanan administrasi penduduk lebih efektif dan efisien
3. Memiliki jumlah yang terukur sehingga sehingga seluruh ketersediaan inventaris mampu mengganti inventaris yang rusak, hilang atau habis pakai.
4. Memiliki waktu yang terukur terhadap penggunaan barang, sehingga mampu menggunakan barang agar tidak cepat rusak

I.6 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir yang peneliti gunakan adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjelaskan latar belakang pelaksanaan tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini menjelaskan tentang *state of the art* dari penelitian dan posisi yang diperoleh yang disusun sesuai urutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti terkait model penelitian dan sistematika penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini berisi identifikasi kondisi analisis usulan, desain *diagram* kebutuhan aplikasi, dan desain tampilan aplikasi.

BAB V HASIL DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil aplikasi Manajemen *Inventory* Logistik E-KTP khususnya pengujian aplikasi yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai ringkasan mengenai hasil penelitian dan saran untuk kemungkinan dikembangkan pada penelitian selanjutnya.